

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penguatan Good Governance dalam pengelolaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi di dalam sektor public maupun sektor swasta. *Good Governace* adalah paradigma kepada negara berkembang, dari banyaknya negara berkembang tersebut Indonesia lah salah satunya. World Bank dalam Mardiasmo memberikan definisi bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggara manajemen pembangun yang searah dan memegang hakikat demokrasi, penghindaran salah alokasi dana penanaman modal, mencegah kasus korupsi selaku politik dan administrative. Pada artinya goverance adalah tata cara pemerintah untuk dapat mengatur sumber daya yang ada dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan berada dilingkup masyarakat, dalam menuju *good governance* tersebut, pemerintah dan masyarakat menjadi aktor awal untuk dapat terwujudnya *good governance* di Indonesia. Sedangkan, pada otonomi sendiri merupakan langkah awal untuk terlaksananya mendukung *good governance*. Dalam keterbukaan informasi untuk masyarakat di era persaingan global sangatlah penting, dengan hal itulah yang menghasilkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan menentukan keberhasilan negara.

Selanjutnya, pada tata kelola pemerintahan yang baik sebutulnya mempunyai karakteristik demi mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia, karakteristik tersebut terdiri dari keterbukaan dan transparansi yang merupakan pondasi awal untuk dapat terciptnya *good governance*. Pada era teknologi digitalisasi ini, guna dapat mengikuti perkembangan zaman yang lebih spesifik dalam sektor pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang lebih efisien,

transparansi yang tepat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang atau Jasa. Dengan melalui peraturan tersebut sudah diatur secara elektronik. Transparansi memiliki konsep yang menunjuk pada sebuah keadaan dalam alur penyelenggaraan terhadap pelayanan yang mempunyai sifat keterbukaan, perlu diketahui banyak orang dan adanya stakeholders yang diperlukan.

Dalam penyelenggaraan baik pada DPRD bersama Pemerintah Daerah di dalamnya terdapat visi serta misi yang merupakan pertolongan pada keteguhan otonomi yang luas pada tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPRD untuk mendorong perwujudan pada tata kelola pemerintahan yang baik secara proposional dalam penyelenggara pemerintah daerah inilah merupakan bagian yang terpenting karena dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut dapat mengurangi terjadinya tingkat korupsi yang ada pada setiap wilayah tersebut. Hal tersebut juga menyangkut pada pengelolaan keuangan pada program pembangunan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan bagian dari kontribusi DPRD dalam kinerjanya.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat $106^{\circ}38' - 106^{\circ}47'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}13'30'' - 06^{\circ}22'30''$ Lintang Selatan. Secara administrative Kota Tangerang Selatan memiliki 7 kecamatan, 49 kelurahan dan 5 desa dengan luas wilayah $147,19 \text{ Km}^2$ atau 14.719 Ha. Adanya Jumlah penduduk yang berada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.593.812 jiwa yang terdiri dari 802.908 jiwa penduduk laki-laki dan 790.904 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk yang mencapai 10.828 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan terus meningkat, hal tersebut disebabkan karena letak yang strategis apabila dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Kota Tangerang Selatan memiliki motto “Cerdas, Modern dan Religius”,

motto tersebut merupakan sifat-sifat mulia yang menjadi tantangan dan harapan semua pihak. Adapun pada visi misi Kota Tangerang Selatan yaitu pada visi nya: “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri”, sedangkan pada misi tersebut adalah meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan, menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan berdirinya tersebut merupakan daerah otonom, maka tercipta juga lembaga penyelenggaraan daerah yaitu DPRD Kota Tangerang Selatan yang mempunyai peranan sebagai instansi yang memiliki posisi untuk mewakili rakyatnya dan memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD. DPRD juga memiliki fungsi dalam rancangan pembentukan perda, fungsi pengawasan yang menjalankan fungsi dalam rangka menuju *good governance* dan menjadi fungsi anggaran untuk Kota Tangerang Selatan. Berdirinya DPRD sebagai dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan suatu peraturan Walikota, Peraturan Daerah dan pelaksanaan undang-undang dalam penyelenggara Pemerintah Daerah. E-katalog hadir sebagai sebuah sistem informasi yang terdapat beragam informasi berbentuk jenis, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia dan spesifikasi teknis. Pada dasarnya penerapan e-katalog ini merupakan sebuah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres, dengan menindih percepatan membuka sistem e-procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis e-katalog. Saat ini e-katalog sudah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menerapkan sistem transparansi. Biasanya e-katalog digunakan untuk pemasaran hasil produk UMKM, penggunaan e-katalog ini benar adanya dan menjadikan penunjang aktivitas bagi para

UMKM di Kota Tangerang Selatan. Baik pada struktur pemerintahan Kota Tangerang Selatan saat ini sudah maju dan infrastruktur pembangunan, jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk operasional masyarakat sudah tertata dengan rapih.

Hadirnya kebijakan mengenai barang/jasa dengan melalui mekanisme e-purchasing sistem e-katalog tersebut merupakan kebijakan baru yang mempunyai tujuan guna dapat membantu alur pengadaan pemerintah di era Internet of Things (IoT) agar dapat sesuai dengan mengikuti kemajuan jaman. Saat ini Indonesia sudah memasuki kedalam donomian yang lebih baik pemerintah memerlukan e-katalog dalam tata kelola, karena tata kelola ini merupakan bagian dari dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terpenting. Dalam pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa dengan melalui e-katalog ini lebih lagi diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden yang terdapat pada Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah. Oleh sebab itu e-katalog tersebut sangat diperlukan sebagai kriteria untuk pemenuhan kebutuhan nasional yang dimana pengadaan barang dan jasa ini dibiayai oleh lembaga kementerian ataupun perangkat daerah yang semuanya telah teranggar oleh APBN/APBD.

Legislatif sangat mendukung serta mendorong hadirnya sistem e-katalog, hadirnya e-katalog ini sangat berkaitan pada peningkatan pelayanan public. Dalam pengawasannya terhadap sebuah pengelolaan anggaran oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah sebetulnya sangat penting untuk dilakukan, hal tersebut dikarenakan pengawasan ini merupakan sebuah usaha yang nantinya akan memberi jaminan keserasian. Anggaran dalam suatu daerah sangat penting, semakin kuatnya peran DPRD maka dengan begitu mutu dalam sebuah kualitas anggota legislatif yang sangat memastikan. Legislatif juga mempunyai komitmen untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, untuk mewujudkan hal tersebut legislated memberikan

dorongan kepada eksekutif untuk membuat sebuah regulasi yang memiliki sasaran tepat lebih khususnya pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan suatu aktivitas akan dapat mencapai barang dan jasa yang bertujuan dalam mencakup kebutuhan kementrian, perangkat daerah, lembaga, dan instansi pemerintah. Pelaksanaan pemberian barang atau jasa ini memiliki prinsip dalam prosesnya yang menjadikan acuan dalam pelaksanaannya. Disisi lain dalam proses pengadaan barang atau jasa ini masi terdapat faktor yang menjadi penghambat suatu pengimputan, aplikasi belanja online yang dirancang oleh lembaga, fitur e-katalog ini memberikan efisiensi bagi penyedia hal ini dikarenakan dalam melakukan pembelian penyedia tidak perlu lagi berkunjung ke lokasi yang bertujuan untuk dapat mencari informasi mengenai katalog sehingga penyedia ini hanya dapat untuk mengaksesnya dengan melalui laman yang telah dituju.

Seiring dengan berjalannya waktu dalam mengakses terdapat permasalahan yang sering terjadi terhadap e-katalog yang meliputi ketidak lengkapan produk, kesulitan navigasi dalam situs, masalah pada teknis seperti lambatnya loading halaman, dan keamanan data pelanggan yang masih kurang terjamin, pada latar belakang ini menuju pada studi kasus yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan, dalam mengakses aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan sehingga belum efektif dalam implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis elektronik di LKPP. Seperti diketahui bahwa pengadaan pengelolaan barang dan jasa ini memiliki peran dalam penguatan good governance. Sebetulnya hadirnya e-katalog ini dapat membantu mendorong transparansi dalam pembelian public dengan menyediakan akses terbuka kepada informasi produk dan harga, intansi pemerintah juga dapat memastikan bahwa proses pembelian ini dilakukan secara transparansi dan adil. Hal ini membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa public. Tidak hanya

itu saja, e-katalog juga memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pengeluaran pemerintah, karena semua transaksi tercatat secara online dan dapat diaudit dengan lebih mudah.

Sebelum memanfaatkan sistem e-katalog dan e-purchasing, sistem pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kesepakatan umum. Berdasarkan pada latar belakang diatas mengenai DPRD Kota Tangerang Selatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. E-procurement merupakan serangkaian kegiatan untuk dapat mendapatkan barang dan jasa dengan cara efektif, efisien serta transparan yang sesuai dalam kebutuhan serta keinginan. Dalam dunia pemerintahan hadirnya sebuah teknologi menjadi kemajuan yang sangat maksimal untuk dapat meningkatkan performa pekerjaan apalagi pada sebuah instansi pemerintahan hal tersebut sangat membantu. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deby (2021), mengenai Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-katalog yang dilaksanakan di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi pada perkembangan informasi, dan terdapat kendala mengenai perbedaan impresi tata cara pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017-2019 dari hasil penelitian terdahulu tersebut menjelaskan bahwa e-katalog berjalan dengan efektif namun masih belum optimal dalam penerapannya. Pelaksanaan yang kurang efektif ini ditunjuk karena masih adanya indikator yang menjadi permasalahan antara lain seperti kepuasan, adaptasi, perkembangan, produksi dan efisiensi. Tidak hanya itu saja terbatasnya sumber daya manusia, aparatur manusia juga belum mencukupi sehingga pencapaian dalam memajukan kinerja jumlah pengadaan dengan melalui e-katalog belum dapat berjalan maksimal.

Dengan itu penelitian ini nantinya ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan performa kerja dengan tujuan untuk dapat meningkatkan transparansi transaksi barang dan jasa melalui e-katalog begi terwujudnya

good governance di DPRD Kota Tangerang Selatan. Dilihat dalam sistem procurement merupakan sistem yang dirancang untuk dapat memastikan bahwa pengadaan ini dapat dilakukan dengan efisien. Dalam sistem ini komponen utamanya dalam sistem procurement tersebut adalah perencanaan pengadaan, permintaan penawaran, seleksi pemasok, pengadaan elektronik, kontrak dan negosiasi, pelaksanaan pengadaan, pembayaran, pemantauan dan evaluasi, audit dan kepatuhan, pengelolaan risiko, dan penggunaan teknologi dalam procurement.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti adalah:

- 1.2.1 Bagaimana manfaat dari adanya e-katalog dalam sistem implementasi yang diberikan pada barang dan jasa secara online untuk dapat mewujudkan good governance
- 1.2.2 Apakah E-Katalog tersebut sudah mampu secara optimal untuk dapat mendorong transparansi barang dan jasa di DPRD Kota Tangerang Selatan

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat memperoleh tujuan penelitian seperti berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui manfaat yang diberikan dari adanya sistem implementasi
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah e-katalog sudah mampu secara optimal dalam mendorong transparansi barang dan jasa di DPRD Kota Tangerang Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, selanjutnya dengan melalui penelitian dapat diharapkan akan memperoleh manfaat seperti berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya diinginkan dapat berupaya mampu membagikan utilitas baik secara teoritis yang berarti bahan gagasan dan menambah pemahaman mengenai transaksi barang dan jasa melalui e-katalog bagi terwujudnya good governance

1.4.2. Manfaat praktisi

Hasil penelitian diinginkan dapat berupaya menggali informasi yang menjadi wawasan pengetahuan mengenai sistem implementasi transaksi barang dan jasa melalui e-katalog dalam mewujudkan good governance dan menjadi masukan untuk guna memperbaiki dan meningkatkan transparansi

1.5. Penelitian Terdahulu

Diperoleh penelitian terdahulu yang dipakai oleh penulis sebagai tolak ukur dalam penulisan dan menganalisis penelitian ini. Pada penelitian terdahulu ini untuk mendudukan diskusi dari suatu topik dalam rentang waktu yang ada, sehingga untuk menghindari terdapatnya plagiasi dari dalam penelitian ini, dan untuk memacu peneliti dalam melakukan penelitian nanti sehingga untuk memperoleh hasil yang baru. Penelitian terdahulu ini sudah terdapat beberapa penelitian yang mempunyai topik hampir sama pada penelitian yang akan saya teliti, penelitian ini dilakukan oleh Iqbal (2020), menyebutkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan. Dapat dilihat dari sebagian perspektif di Indonesia sendiri tidak dapat dilepas dari aktivitas tersebut. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini sudah diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 hal ini sudah diatur dengan meliputi penganggaran, perencanaan, persiapan lelang, pengumuman lelang, penentuan harga perkiraan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.

Menurut peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, E-katalog merupakan sistem informasi elektronik yang mencakup daftar, spesifikasi teknis, karakter dan jumlah harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2019) e-katalog menjadi instrument dalam menghasilkan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terbuka dan efisiensi. E-katalog ini juga menjadi banyak pilihan yang fleksibel dalam membeli suatu produk, hingga nantinya pemerintah akan membeli produk sesuai pada kebutuhannya. Namun, pada proses penayangan produk dalam portal e-katalog ini memang memakan waktu yang cukup lama tetapi dengan waktu tersebut nantinya akan memberi dampak pada proses pengadaan barang yang lebih efisiensi. Seperti yang terjadi di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri (2022) melaksanakan program e-katalog lokal, e-katalog lokal ini dilaksanakan oleh pemerintah guna dapat membantu menstabilkan perekonomian UMKM Kota Medan karena adanya faktor covid-19. Pemerintah mengadakan barang/jasa makan dan minuman, dengan hadirnya program ini masyarakat memberikan respon yang baik untuk para pelaku UMKM.

E-katalog terbagi atas katalog elektronik nasional, elektronik sektoral dan elektronik lokal. Upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance ini melakukan cara reformasi dalam kegiatan pemerintahan dengan melalui layanan publik untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital. Ini menjadi dorongan sistem transparansi yang ditetapkan untuk menjamin kesejahteraan intansi dan memperangi praktik korupsi. Namun era teknologi digital saat ini pasti tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Deby (2021), pada penelitian ini mengetahui bahwa efektivitas pengadaan barang dan jasa E-katalog di wilayah Kebayoran Lama berjalan dengan efektif, tetapi dalam jalannya tersebut masih terdapat kurang optimal pasalnya dalam penerapannya ini terdapat

indikator-indikator lain yang masih kurang dan belum terkendali. Tidak hanya itu saja keterbatasan sumber daya manusia juga mempengaruhi sehingga pencapaian dalam meningkatkan kinerja jumlah pengadaanpun belum berjalan dengan maksimal.

Dalam analisis stakeholder mengenai kebijakan e-katalog lokal dalam membranding produk lokal sebagaimana yang telah diteliti dalam penelitian Binti (2022), menjelaskan pada era saat ini persaingan antara produk impor dan produk lokal bertarung sangat sengit. Hal ini akhirnya menyebabkan terjadinya persaingan bisnis, karena di Indonesia bangsanya berkomitmen dalam menyepakati AFTA maupun WTO. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menghadapi perekonomian dunia yang semakin terbuka, Indonesia memiliki UMKM saat ini UMKM semakin luas tetapi terdapat pula tantangan daya saing yang semakin besar. Umumnya UMKM merupakan produk ekspor unggulan, tetapi memiliki daya saing yang cukup lemah. Pelaku UMKM tersendiri memanfaatkan sumberdaya lokal, baik pada sumber daya manusia, bahan baku, modal, hingga peralatan yang aritnya sebagian besar dari kebutuhan UMKM ini tidak hanya mengandalkan barang impor saja. Adanya pengadaan barang dan jasa dengan melalui e-katalog secara otomatis akan mengubah roda perekonomian yang akan lebih berputar dengan cepat dari pada harus mengusulkan ke pusat, disini UMKM juga akan tumbuh besar.

1.6. Kerangka Teori

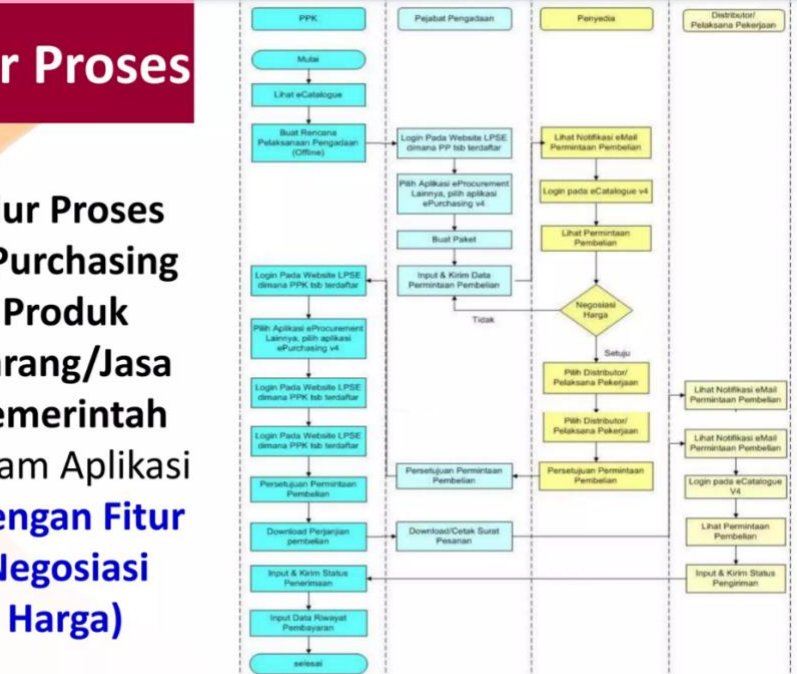
E-Purchasing merupakan metode pembelian barang atau jasa yang prosesnya dilakukan dengan sistem e-katalog. Dalam peraturannya e-purchasing ini terdapat pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dengan dasar hukum serta kewajiban untuk setiap instansi pemerintah yang melangsungkan pengadaan dengan melalui e-purchasing. Tiap instansi pemerintah e-purchasing ini dapat dilaksanakan oleh para pejabat pengadaan/PPK atau pejabat yang telah ditetapkan oleh tiap pimpinan intitusi. Di Indonesia sistem e-purchasing dapat diakses

1. Negosiasi harga
2. Mini-Kompetisi
3. Competitive catalog

Alur Proses



Alur Proses e-Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi (Dengan Fitur Negosiasi Harga)



```
graph TD
    subgraph PPW [PPW]
        M1[Mulai] --> L1[Lihat eCatalogue]
        L1 --> B1[Buat Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Online)]
        B1 --> L2[Login Pada Website LPSE dimana PPW kab terdaftar]
        L2 --> P1[Pilih Aplikasi eProcurement Lainnya, pilih aplikasi ePurchasing v4]
        P1 --> B2[Buat Paket]
        B2 --> I1[Input & Kirim Data Permintaan Pembelian]
        I1 --> T1{Tidak}
        T1 --> L2
        I1 --> P2[Persejukan Permintaan Pembelian]
        P2 --> D1[Download/Carik Surat Pemesan]
        D1 --> I2[Input & Kirim Status Penawaran]
        I2 --> I3[Input Data Riwayat Pembayaran]
        I3 --> E1[selesai]
    end

    subgraph Pejabat [Pejabat Pengadaan]
        L3[Login Pada Website LPSE dimana PPW kab terdaftar]
        P3[Pilih Aplikasi eProcurement Lainnya, pilih aplikasi ePurchasing v4]
        B3[Buat Paket]
        I2
        D2[Download/Carik Surat Pemesan]
    end

    subgraph Penyedia [Penyedia]
        L4[Lihat Notifikasi eMail Permintaan Pembelian]
        L5[Login pada eCatalogue v4]
        L6[Lihat Permintaan Pembelian]
        D3{Negosiasi Harga}
        S1[Setuju]
        P4[Pilih Distributor/ Pelaksana Pekerjaan]
        P5[Pilih Distributor/ Pelaksana Pekerjaan]
        P6[Persejukan Permintaan Pembelian]
    end

    subgraph Distributor [Distributor/ Pelaksana Pekerjaan]
        L7[Lihat Notifikasi eMail Permintaan Pembelian]
        L8[Lihat Notifikasi eMail Permintaan Pembelian]
        L9[Login pada eCatalogue v4]
        L10[Lihat Permintaan Pembelian]
        I4[Input & Kirim Status Pengiriman]
    end

    B1 --> L3
    P1 --> L4
    B2 --> L5
    I1 --> L6
    T1 --> L3
    P2 --> D3
    D3 -- S1 --> P4
    D3 --> P5
    P4 --> P6
    P5 --> P6
    P6 --> I2
    D2 --> I2
    I2 --> I4
```

1.6.1. E-Katalog

E-katalog dalam implementasi merupakan sistem pengadaan online, dalam e-katalog dalam pembuatan e-katalog ini memang terdapat rintangan yang diciptakan oleh perangkat desa atau perangkat lunak yang berbeda dan beragam masing-masing kemampuannya untuk dapat berinteraksi dengan IT. E-katalog merupakan sistem informasi elektronik yang termuat dari jenis, daftar, harga, spesifikasi teknis. Pada penerapannya e-katalog memperhatikan prinsip-prinsip yang sebagaimana sudah di jelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

e-katalog memiliki 3 (tiga) kriteria yang terdiri dari e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah. E-katalog ini sebagai sarana dari proses pengadaan untuk para pelaku pengadaan barang jasa yang nantinya akan menjadimin sistem transparansi yang menjadi lebih muda dan efisien terutama pada lembaga pemerintah. Hadirnya e-katalog dapat diharapkan akan menciptakan iklim persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas produk, dan mampu mengembangkan prestasi kerja.

1.6.2 Lokal Good Governance

Good Governance adalah suatu acuan utama dari adanya praktik pemerintahan, pada praktik tersebut pemerintah telah memiliki komitmen yang demokratis. Pemerintah yang demokratis ini yaitu pemerintah yang mengutamakan masyarakat sebagai acuan dari aktivitas yang di jalankan oleh pemerintahan yang sesuai dengan peraturan menurut Gaffar (1999), mengatakan bahwa DPRD tersebut sudah dibekali oleh hak, apabila dilaksanakan dengan baik akan menyebabkan lembaga tersebut dapat memainkan peranan dan fungsi yang sangat mampu untuk menciptakan *checks and balances* bersama pihak eksekutif.

Pada definisinya *good governance* sangat penting, dengan kepentingan tersebut sebagaimana telah diusung oleh PPB mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development gold) itu sangat penting untuk mengedepankan dan mengembangkan pembangunan manusia. Dalam paradigma *good governance* pada praktiknya mengedepankan adanya beberapa prinsip, prinsip tersebut yang dimaksud adalah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengawasan, dan kesetaraan, prinsip tersebut dijelaskan oleh UNDP (1997: Bappenas 2008; dan European Union 2013). Menurut World Bank dalam Mardiasmo memberikan definisi bahwa *Good Governance* merupakan sebagai penyelenggara dalam mengatur kegiatan pembangunan yang terarah pada prinsip demokrasi, menghindari adanya kesalahan dalam alokasi dana investasi, serta mencegah terjadinya kasus korupsi baik pada politik dan administrative.

Good governance dalam sector publik yang ada di Indonesia diamanatkan menjadi tiga bagian yaitu: legislatif, yudikatif dan eksekutif. Pada legislatif di jalankan oleh DPRD, dalam melakukan peranannya menjadi wakil rakyat untuk melaksanakan ketiga fungsi utama yang terdiri legislasi, penganggaran dan juga pengawasan. Dari adanya ketiga elemen fungsi itu perlu dilakukan dengan benar dan baik. Adanya konteks tata kelola pemerintahan yang baik, peran DPRD perlu diwujudkan pada proses penyusunan APBD dengan terus mengujung *fiduciary duty*. Dengan *Fiduciary duty* ini dalam menjalankan peran DPRD pada *policy maker* dan tidak pada *policy implementer* di dalam kalangan daerah. Karena *fiduciary duty* pada dasarnya merupakan asas dimana pada pengangkatan yang dilakukan oleh para anggota DPR atau DPRD harus berdasarkan mengenai asas yang menjadikan pondasi yaitu asas kepercayaan yang berada dari rakyatnya. Sehingga *fiduciary duty* harus dijunjung tinggi pada setiap pelaksanaan proses fungsilegisasi yang sedang berjalan.

1.6.3 E-Procurement

E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat mengelola keseluruhan proses pengadaan, dalam proses ini dimulai dari pengumuman tender hingga pembayaran. E-procurement menurut Sutedi (2012:254) adalah sistem lelang pada pengadaan barang atau jasa pemerintah yang memanfaatkan teknologi baik pada informasi dan komunikasi berbasis internet. Hal ini bertujuan agar dapat berjalan secara terbuka, akuntabel, efektif serta efisien. Pada E-procurement ini memiliki dua elemen penting, yang dapat dilakukan dengan dua cara *e-Tendering* dan *e-Purchasing*.

- a. *E-Tendering* merupakan proses dalam pengadaan barang atau jasa yang dapat diikuti oleh penyedia barang atau jasa baik secara elektronik hanya dengan melalui cara penawaran yang dilakukan satu kali.
- b. *E-Purchasing* merupakan proses dalam pengadaan barang atau jasa yang dapat dilakukan melalui katalog elektronik. Pada proses tersebut memuat informasi spesifikasi dan harga pada barang atau jasa. Hadirnya e-pruchasing ini memiliki tujuan untuk dapat terciptanya proses pemilihan barang atau jasa yang dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik dan e-purchasing ini sangat efisien baik pada segi biaya serta waktu dalam proses pemilihan barang atau jasa yang dilakukan secara online

1.6.4 Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Penerapan kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam sebuah prosedur. Pada tahapan ini yang nantinya menentukan apakah pada penerapan kebijakan tersebut dapat dijalani dengan benar oleh pemerintah serta berhasil dan menghasilkan output dan outcomes layaknya

yang sudah terencana sebelumnya. Teori Charles O. Jones ini menjadikan analisis dengan melihat permasalahan yang terjadi, Charles O, Jones (1995:166), mengemukakan perihal penerapan kebijakan yang merupakan serangkaian dari kegiatan untuk melangsungkan program yang telah dimaksud dengan adanya tujuan. Dalam kebijakan Charles O. Jones pada penerapan kebijakannya memiliki tiga penerapan kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang penting, aktivitas utama tersebut adalah organization, interpretation, and application.

Dalam aktivitas pertama dalam penerapan kebijakan menurut Charles O. Jones yaitu organisasi menurut Jones (1996:170) *"Public policy can rarely be implemented by itself. Organization is essential to getting the job done. Organizations in government have become synonymous with the term bureaucracy."* dalam pelaksana kebijakan, dalam penerapan ini membentuk atau menata sumber daya serta yang dimana nantinya akan membentuk agenda yang berjalan. Kedua terdapat interpretasi, pada interpretasi ini Jones (1996:178) memberikan kutipan mengenai pendapat Edward III sebagai berikut: *"The first requirement for effective policy implementation is that those who will implement a decision must know what they are supposed to do... If the policy is to be implemented correctly, implementation directives must not only be accepted, but must also be clear. Otherwise, policy implementers will be confused about what they should do, and they will have the freedom to impose their own views on policy implementation, views that may differ from those of their superior."* yang merupakan aktivitas dari pelaksanaan penerapan kebijakan, ini yang nantinya akan menganalisis agar pelaksanaan program tersebut dapat dijalankan serta diterima, selanjutnya, untuk tidak terjadi kebingungan pada pelaksana kebijakan tersebut maka dalam penerapan kebijakan tersebut harus tahu apa yang harus mereka lakukan, hal ini dilakukan agar pelaksana tersebut dapat mengetahui apa tujuan yang akan dicapai dalam adanya implementasi tersebut.

Pada penerapan ketiga terdapat aplikasi, “*Application only refers to doing work. This includes “provision of goods and services” as well as other program objectives (for example, regulation and defense)*” (Jones 1996:180) yang merupakan aktivitas dari pelaksana kebijakan yang dapat membentuk ketentuan rutin dari semua program baik pada pelayanan, pembayaran, pengawasan dan kemudahan, yang sesuai pada tujuan yang telah ditentukan.

1.7. Oprasional Konsep

E-katalog dalam konteks instansi pemerintah adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola katalog produk atau layanan secara elektronik. Hadirnya e-katalog memberikan tujuan untuk memudah proses pengadaan barang dan transparansi oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan penelitian ini terkait dengan e-katalog, penulis menggunakan konsep menurut Charles O, Jones (dalam Ponto, Pioh, & Tasik, 2016). Dengan indicator sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Teori, Indikator, dan Sub Indikator

Teori	Indikator	Sub Indikator
Model Implementasi Kebijakan menurut Charles O. Jones, yaitu jalannya kegiatan untuk melaksanakan sebuah program.	Organisasi: Organisasi ini mencakup pembentukan atau penataan sumber daya, unit-unit serta motode untuk menjadikan program berjalan. Program	1. Sumber daya. (SDM 2. Unit kerja 3. PPKO (Pejabat Pembuat Komitmmen)

	berjalan tersebut nantinya akan mendorong nilai transparansi yang memberikan informasi seputar keuangan.	4. Penjabat Barang/Jasa 5. PPTK (Kasubag/Pejabat Fungsional) 6. Penyedia
	Interpretasi: Usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan untuk menciptakan nilai transparansi atau direalisasikan	1. Pemahaman pelaksana kebijakan 2. Kejelasan kebijakan 3. Konsistensi kebijakan
	Aplikasi: Pelaksanaan kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkanan program dari kebijakan public yang telah ditentukan.	a. Keberjalanan dan kondisi sistem E-katalog b. Permasalahan kendala dalam penerapan E-Katalog c. Manfaat yang diterima dari adanya E-katalog

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif mengarah atas fenomena atau indikasi yang memiliki sifat lumrah. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif ini, memakai teknik uraian mendalam (*in-depth analysis*), yaitu dengan mendalami permasalahan sebagai khusus sebab mempunyai karakter dari satu permasalahan dapat tidak sama dengan karakter dari adanya permasalahan lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini, merupakan pendekatan penelitian pada ilmu sosial yang mengaplikasikan paradigma alamiah, dengan berdasar pada teori fenomenologis untuk selanjutnya akan meneliti mengenai masalah sosial pada suatu wilayah baik dari segi latar dan sudut pandang obyek yang diteliti secara holistic. Penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat menggali serta dapat menemukan informasi mengenai suatu topik atau permasalahan yang akan diteliti. Pada informasi yang dimaksud yaitu Peran E-Katalog Dalam Mendorong Transparansi Transaksi Barang dan Jasa DPRD Kota Tangerang Selatan.

1.8.2. Subjek Penelitian

Berdasarkan subjek penelitian dapat dikatakan unsur terpenting dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dikarenakan bahwa subjek penelitian yang nantinya akan memberikan data atau informasi yang penting dan berkaitan pada fenomena yang terjadi secara ada dan nyata. Subjek pada penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai narasumber atau informan. Informan penelitian ini merupakan anggota staff dari DPRD Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan penyedia e-katalog yang diharapkan mampu membagikan informasi dan menerangkan mengenai apa yang diketahui terhadap sesuatu yang berkaitan pada fenomena atau permasalahan yang akan diteliti.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan model data kualitatif. Dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan data sebagai sumber data yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pada data yang akan dipakai dalam penelitian ini terbagi dua jenis terdiridari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan untuk pembuatan penelitian sumbernya diperoleh dengan cara langsung oleh seorang informan. Penulis nantinya akanmemakai teknik pemungutan data dengan menggunakan teknik wawancara, dengan melakukan pembicaraan yang dilaksanakan oleh dua pihak maupun lebih, pewawancara dan yang akan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara yang membagikan informasijawaban terkait dengan seputar pertanyaan yang diberikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dengan tujuan selain untuk menyesuaikan permasalahan yang dijumpai. Data tersebut juga dapat didapatkan dengan secara cepat. Selain pada sumber dari data primer, sumber tersebut juga dapat berupa artikel, skripsi, tesis, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan data sekunder ini nantinya akan digunakan sebagai pelengkap apabila terdapat kekurangan yang belum disebutkan oleh data primer sehingga akan menghasilkansuatu data yang utuh

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang pemungutan datanya dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan maksud target untuk dapat memperoleh maksud tertentu. Wawancara digunakan pada teknik pemungutan data andaikan terdapat peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk dapat mendapati permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin memahami hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penelitian ini memakai teknik wawancara yang dilaksanakan dengan secara tidak terstruktur dan bertujuan untuk mendapat data yang bermanfaat terhadap penelitian. Wawancara ini dapat dilakukan dengan informan yang terbatas dan yang dipandang memiliki informasi yang lebih dalam terkait pada masalah yang akan diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Dalam melangsungkan peninjauan ini lebih dahulu peneliti perlu membuat pendekatan dengan subjek penelitian agar terjadinya kedekatan baik pada penelitian dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan jenis observasi partisipan yang nantinya akan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari dengan cara mengamati yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi ini dilakukan agar peneliti dapat menganalisis secara sistematis mengenai objek yang dikaji sehingga dapat diuji validitasnya.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan notasi dari adanya kasus yang sudah berselang. Dokumen tersebut terdapat tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dengan adanya dokumentasi, digunakan untuk sebagai perlengkap dalam akumulasi data dari

hasilobservasi dan wawancara. Adanya dokumentasi sebagai sebuah bukti/data untuk mengetahui peranan ekatalog dalam mendorong transparansi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni teknik simplifikasi bahan untuk dapat mempermudah pemahamanserta penginterpretasian. Analis data adalah bagian yang utama dalam metode penelitian tersebut,pada saat penelitian ini peneliti harus menentukan dan memilah data yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan jawaban dari permasalahan. Miles dan Huberman (1984) mengatakan terdapat bagian dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data digunakan untuk memastikan data yang bermakna dan lebih relevan,berfokus pada data yang memusat untuk dapat memecahkan masalah dan penemuan. Dengan reduksi data ini dapat dilakukan dengan cara meringkas catatan dari data yang sudah diperoleh. Tujuan reduksi tersebut adalah agar penelitian dapat memperjelas data yang kemudian akan membentuk dan menuju pada kesimpulan serta pemecahan masalah yang di teliti.

2. Sajian Data

Komponen data merupakan hasil dari kumpulan keterangan yang dirakit dalam rupa deskripsi. Penyampaian data mampu dijalankan dalam berupa deskripsi singkat, hubungan antaran kategori, bagan serta flowchar. Langkah untuk mengkaji, peneliti akan menyajikan data yang berbentuk deskripsi yang singkat atau mengkategorikan agar data yang diperoleh lebih jelas.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini adalah proses menafsirkan hasil dari analisis dan interpretasi data yang sudah dilakukan sebelumnya. Menurut data yang sudah direduksi serta diutarakan, peneliti menciptakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pada kebenaran yang kuat dalam proses pengumpulan data. Kesimpulan ini merupakan balasan dari rumusan masalah yang diteliti serta berbagai pertanyaan dari peneliti yang sudah diterangkan pada proses wawancara sejak awal.